**MINI RISET EFEKTIFITAS RETRIBUSI PEDAGANG DI PASAR
SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG**

Oleh:

Ika Nur Aini 1960302100013

Desy Dwi Fitria 1960302100015

Fitri lailatul Badria 1960302100025

Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen A

Universitas Tulungagung

Email: nurainika01@gmail.com

desyfitria081@gmail.com

fitribadria234@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifitasnya retribusi pedagang di pasar Sumbergempol Tulungagung, penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa efektifitas retribusi di pasar Sumbergempol merupakan kewenangan dan tanggung jawab seluruh pedagang. Hasil menunjukan bahwa saat ini para pedagang di pasar Sumbergempol patuh terhadap pembayaran pungutan retribusi.

Kata kunci : Retribusi pasar,efektifitas,pedagang,pembayaran.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine how effective the retribution of traders in the Sumbergempol market Tulungagung, this research is descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection using interview and observation techniques. Data were analyzed quantitatively. Based on the research that has been done, it can be concluded that the effectiveness of retribution in the Sumbergempol market is the authority and responsibility of all traders. The results show that currently traders in the Sumbergempol market comply with the payment of levies.

Keywords: market retribution, effectiveness, traders, payment.

PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu sering dikenal dengan Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), kantor tersebut Pemerintah daerah melalui Kantor Pengelola Pasar harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan berada dibawah wewenang Walikota selaku Kepala Daerah (Kepda) melalui Sekertaris Daerah (Sekda). Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan. Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No.66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retrubusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi pasar di Pasar Sumbergempol masuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pasar masuk dalam retribusi jasa umum karena memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Di Pasar Sumbergempol masuk dalam retribusi jasa umum karena di Pasar Sumbergempol melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah seperti Kabupaten Tulungagung adalah potensi pada sektor pajak. Pajak menjadi salah satu penopang pendapatan terbesar bagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak maka beban anggaran akan semakin kecil. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi alternatif untuk dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pengeluaran yang bersifat efektif dan produktif. Selain itu Kabupaten Tulungagung juga menjadikan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum antara lain pelayanan keamanan dan pelayanan persampahan, jasa usaha (berdagang) dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan di perluas pengelolaannya.

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pasar Kabupaten Tulungagung selaku dinas yang menjadi unsur pelaksana di bidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi Dinas Pasar Kabupaten

Tulungagung terhadap pemasukan daerah bersumber dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Menurut Mardiasmo dalam (Elim et al., 2014) Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*). Menurut Halim dalam (Elim et al., 2014) Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan social atas suatu entitas yang dapat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mursyidi dalam (Elim et al., 2014) Akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Menurut Nordiawan dalam (Elim et al., 2014) menyatakan organisasi sektor publik. Barang public adalah barang yang memiliki dua karakter. Pertama barang public adalah komoditas yang keberadaannya tidak memiliki persaingan antar-penyediaannya (*non-rivaldy*), sebagaimana barang privat diperjual belikan dipasar yang penuh persaingan antarprodusennya. Kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya (*non-excludability*) sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Menurut Harun dalam (Elim et al., 2014) sektor publik sebagai sektor ekonomi yang berkonsentrasi pada usaha-usaha penyediaan pelayanan mendasar pada pemerintah, misalnya dalam penyediaan jalan raya, kesehatan pendidikan, keamanan, dan pelayanan mendasar lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Santoso dalam (Handayani, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 Pasal 1 No.50 Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Siahaan dalam (Elim et al., 2014) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah dan
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menurut Darise dalam (Elim et al., 2014) Menyatakan bahwa:

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan Peraturan Peraundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara. Membayar pajak oleh warga negara merupakan kewajiban dan penerimaan dari pajak ini sangat penting bagi pemerintah dalam rangka

membelanjai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik (Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, 2014)

2. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian retribusi daerah. Menurut Sutimbul dalam (Mahayana, 2006) retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir dan sebagainya, jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut.

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum.

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Asas-asas Pemungutan

Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
3. Tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
5. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan keluar daerah.
6. Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
7. Peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

Asas Pemungutan Retribusi Daerah:

1. Asas Keadilan

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.

2. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian :

1. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
2. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.

3. Asas Ekonomis

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti:

1. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
2. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan

- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek

Subjek Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan Subyek Retribusi Daerah terbagi atas:

1. Subyek Retribusi Jasa Umum (Pasal 125) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subyek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 139) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subyek Retribusi Perizinan (Pasal 147) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Daerah

Menurut Siahaan dalam (Elim et al., 2014) Objek retribusi daerah terdiri atas:

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahaan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum pemerintah.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang di miliki atau di kuasai oleh pemerintah

daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi daerah (Undang-undang No. 28 tahun 2009) terdiri atas:

1. Pasal 109 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang di sediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
2. Pasal 126 objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Pasal 140, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan Retribusi Daerah

Kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang- undang No. 28 tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Prinsip atau Kriteria Penentuan tarif Retribusi daerah

Menurut Darise dalam (Elim et al., 2014) , prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi yaitu:

1. Prinsip dan sarana dalam penetapan tarif retribusi jasa umum di dasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemudian masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana secara keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beroperasi pada harga pasar.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Siahaan dalam (Elim et al., 2014) menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebagiannya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

Menurut Siahaan dalam (Elim et al., 2014) bahwa Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Retribusi Pasar/ Retribusi Pelayanan Pasar

Pengertian pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu system pengelolaan oleh pemerintahan daerah, pihak ketiga/swasta/koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya.

Pasar daerah adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/ peralatan dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah Kota Tulungagung

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan. Dan disebutkan juga bahwa Pelayanan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan Pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

Retribusi Pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Objek Retribusi Pasar

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios/bedak/pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Teori Efektifitas.

Menurut Halim dalam (Elim et al., 2014) efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas yang terkait dengan dengan retribusi maupun perpajakan menurut simajundak dikutip dalam Halim dalam (Elim et al., 2014) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dan potensi retribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Potensi Penerimaan Retribusi

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi mana dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai efektifitas. Ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Menurut Halim dalam (Elim et al., 2014) bahwa efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.

3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dalam penelitian ini, analisis efektifitas merupakan suatu analisa atas perbandingan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target Retribusi pasar yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasar yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi pasar memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar/ retribusi pasar) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Menurut Mahmudi dalam (Elim et al., 2014) bahwa semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi pasar terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi pasar terhadap PAD juga kecil.

Penelitian Terdahulu

1. Memah (2013) dengan judul: efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan resto terhadap PAD Manado. Peneliti menggunakan metode deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari pajak hotel dan pajak resto pada tahun 2007-2009 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat tertinggi efektifitas terjadi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89% kontribusi secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi dan perbedaannya pada variable yang di ambil yaitu pajak.
2. Mosal (2013) dengan judul: analisis efektifitas, kontribusi pajak parkir terhadap PAD dan penerapan akuntansi di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Peneliti menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan tingkat tertinggi efektifitas pajak parkir tahun 2011, sedangkan terendah 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir terbesar

tahun 2011 dan terendah tahun 2009. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi dan perbedaannya pada variable yang di ambil yaitu pajak.

3. Pattiasina (2011) dengan judul: analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di kabupaten Maluku Tenggara. Tujuan penelitian ini untuk menghitung besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD. Metode yang di gunakan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfrustasi dengan kecenderungan menurun. Persamaannya yaitu tujuannya untuk menganalisis besarnya kontribusi dan perbedaannya pada variabel yang di ambil yaitu pajak dan tempat penelitiannya di Maluku Tenggara.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sumbergempol Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Alasan peneliti memilih Pasar Sumbergempol sebagai lokasi penelitian yaitu peneliti melihat bahwa dalam proses pembayaran retribusi pasar, ketaatan hukum pedagang dalam membayar retribusi terlihat tinggi. Banyak pedagang di pasar sumbergempol yang patuh terhadap pembayaran pungutan retribusi. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021.

Jenis Penelitian

Menurut Nasution dalam (Handayani, 2017) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Desain dari penelitian ini adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Efektifitas Pembayaran Retribusi di Pasar Sumbergempol.

Subyek Penelitian

Menurut Moleong dalam (Nurfiati et al., 2019) Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, subjek dalam penelitian ini terdiri dari responden, yaitu para pedagang sebanyak 15 orang.

Jenis Dan Sumber Data

1) Jenis Data

Menurut Narbuko dalam (Handayani, 2017) , Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan atau faktafakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan–bahan dokumen berupa peraturan perundang–undangan, buku kepustakaan dan sebagainya.

2) Sumber Data Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Hasil Wawancara dari beberapa pedagang yang ada di Pasar Sumbergempol.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara,kuesioner,dan dokumentasi.

1. Observasi, dilaksanakan untuk keperluan pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai aktivitas pedagang di Pasar Sumbergempol.
2. Wawancara mendalam, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh informasi seacara rinci dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang sudah ada, data yang dimaksud berupa gambaran data hasil penerimaan retribusi.
4. Kuesioner/angket, adalah suatau alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang dapat diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis.

PEMBAHASAN

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting karena pada setiap tahunnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dari sekian banyak Retribusi Daerah, Retribusi Pasar merupakan aspek yang memberikan kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian pengelolaan Retribusi Pasar di daerah masih belum optimal dan efektif dikarenakan kurangnya pemahaman pentingnya pengelolaan dana retribusi yang lebih abik serta faktor keamanan dalam pengelolaan karena menyangkut pendapatan daerah. Mengingat penting dan bahayanya mengelola dana retribusi yang berjumlah banyak, maka dibentuklah Sistem Informasi Pemasukan Dana Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Sumbergempol dengan studi kasus pasar Sumbergempol Kabupaten Sumbergempol. Sistem ini dibentuk dengan maksud mempermudah pegawai pasar yang bersangkutan untuk memasukkan data dana masuk dan dapat dikelola serta dapat dilihat langsung oleh Dinas Kabupaten terkait untuk meninjau realitas dana masuk dengan target tahunan. Retribusi pasar sumbergempol merupakan jumlah keseluruhan dari pemasukan wajib pajak yang dibayarkan oleh penyewa dipasar Sumbergempol. Dibawah ini adalah sampel data retribusi dipasar sumbegempol yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Pedagang	Membayar Retribusi/Tidak	Per Hari	Per Bulan	Per tahun
Pedagang 1	Membayar	3000	15.000	57.000
Pedagang 2	Membayar	1000	30.000	55.000
Pedagang 3	Membayar	2000	20.000	45,000
Pedagang 4	Membayar	1000	35.000	55.000
Pedagang 5	Membayar	2000	50.000	-
Pedagang 6	Membayar	2000	-	-
Pedagang 7	Membayar	2000	-	-
Pedagang 8	Membayar	2000	43000	-
Pedagang 9	Membayar	2000	-	-
Pedagang 10	Membayar	1000	-	-
Pedagang 11	Membayar	3000	45.000	60.000
Pedagang 12	Membayar	2000	15.000	42.000
Pedagang 13	Membayar	2000	35.000	65.000

Pedagang 14	Membayar	2000	-	-
Pedagang 15	Membayar	2000	-	-

Dari 15 sampel yang sudah kami lakukan survey menghasilkan data yang dimana semua data sebagai berikut:

1. Terdapat 7 pedagang yang membayar retribusi Harian, Bulanan, Tahunan
2. Terdapat 2 pedagang yang membayar retribusi Harian, Bulanan
3. Terdapat 6 pedagang yang membayar retribusi Harian

Dari sampel yang telah kami dapat menyatakan bahwa pembayaran retribusi Tepatnya di pasar Sumbergempol Tulungagung. Penulis menemui beberapa pedagang, menurut para pedagang, Dinas pasar mengenakan pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 2000 setiap hari. Ada juga yang membayar pungutan retribusi sebesar Rp 1000 sampai Rp 2000 tergantung pedagang tersebut menyewa apa dan berjualan apa. Kalau menyewa ruko/toko pedagang di kenai pungutan retribusi sekitar Rp 1000. Kalau menyewang tempat berupa counter/los dan halaman pasar yang sudah disediakan di dala pasar akan di kenai biaya Rp 2000.

Untuk pungutan retribusi pelayanan pasar pedagang akan di pungut setiap hari dan setiap bulan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya kebersihan seperti membersihkan sampah yang ada di pasar dan memindahkan sampah ke tempat pembuangan sementara.

Kalau untuk yang menyewa kios/toko dikenakan pajak per tahunnya kalau untuk yang menyewa los atau yang berada di halaman pasar tidak dikenakan wajib pajak per tahunnya.

Jadi, bisa di simpulkan bahwa pembayaran pungutan retribusi antara penyewaan ruko dan penyewaan los ataupun di halaman pasar berbeda. Lebih murah biaya pungutan retribusi penyewa ruko, karena setiap tahunnya sudah di kenakan untuk membayar pajak. Sedangkan untuk penyewa yang ada los atau yang ada di halaman pasar tidak di kenakan pajak per tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Sumbergempol Tulungagung, pedagang menyewa kios/pelataran yang ada di pasar, pedagang akan dikenakan wajib membayar pungutan retribusi. setiap harinya petugas pemungut retribusi akan berkeliling pasar untuk menagih biaya retribusi. Biaya retribusi digunakan untuk biaya keamanan dan kebersihan seperti membersihkan sampah yang ada di pasar dan memindahkan sampah ke tempat pembuangan sementara.
2. Dari 15 pedagang yang sudah kami wawancara, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya biaya pungutan retribusi tergantung pedagang tersebut menyewa kios/toko, counter/los, dasaran atau halaman pasar yang disediakan di dalam pasar. Dan tergantung pedagang tersebut berjualan apa.
3. Untuk pedagang yang menyewa kios setiap harinya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 1000. Untuk yang ada di los atau halaman pasar akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2000.
4. Untuk yang menyewa kios yang ada di pasar per tahunnya pedagang tersebut dikenakan wajib membayar pajak. Sedangkan untuk yang hanya menyewa los atau di halaman pasar tidak dikenakan membayar pajak per tahunnya cukup membayar pungutan retribusi setiap harinya.

Saran

Saran diberikan:

1. Proses pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di pasar sumbergempol diharapkan untuk ditingkatkan lagi.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar lebih memperhatikan peraturan yang dikeluarkan sehingga Efektivitas atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar bisa mencapai hasil yang lebih maksimal serta lebih memperbaiki dalam hal penulisan dan pembuatan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat (para pedagang) agar tidak ada keraguan dan kejanggalan terhadap retribusi pelayanan pasar.
4. Untuk para petugas pelayanan kebersihan di pasar semoga dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, supaya kebersihan pasar selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Elim, I., Saerang, D., & Toduho, D. (2014). PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
<https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4501>
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24.
<https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>
- Mahayana, A. (2006). *Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (studi penelitian di kantor dinas pengelolaan pasar Kota surakarta)*. Universitas Sebelas Maret.
- Nurfiati, P, A. S., & Syahbuddin. (2019). KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari). 12, 472–481.
- Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, M. (2014). *Analisis Pemenuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Sektor Pajak*. 1(1), 103–120.